

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.

Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Barker, Robert L., 1995, *The Social Work Dictionary: 3rd Edition*, National Association of Social Workers (NASW) Press, Silver Spring.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Henianti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huraerah, Abu, 2018, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosidah, Nikmah, 2013, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Widyawati, Anis dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

B. Artikel Jurnal

Gunarto, Marcus Priyo, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, September, 2020.

Sihotang, Jimmy C., “Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 5, Maret, 2016.

C. Skripsi dan Tesis

Alfero, Muhammad Fuad, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Justisia, Amalia Febri, 2021, “Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tarta, Ahmad Firman, 2015, “Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zahri, Anita, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindakan Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

D. Internet

Kemdikbud, “Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>, diakses 18 Februari 2022.

Kemdikbud, “Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 25 Oktober 2021.

Kemdikbud, “Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>, diakses 18 Februari 2022.

Website TNI, “Delapan Wajib TNI”, <https://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html>, diakses 9 September 2022.

Website TNI, “Sapta Marga”, <https://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, diakses 9 September 2022.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM II-11/AD/IV/2018 perihal putusan tingkat pertama perkara Serda G., 17 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 24-K/PM I-03/AU/VI/2020 perihal putusan tingkat pertama perkara Kopda MD., 16 Juli 2020.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 46-K/PMT-I/BDG/AU/VIII/2020 perihal putusan tingkat banding perkara Kopda MD., 17 September 2020.

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 perihal putusan tingkat pertama perkara Peltu Mes CI., 18 Juli 2018.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018 perihal banding perkara Peltu Mes CI., 28 Agustus 2018.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 perihal putusan tingkat pertama perkara Serda AJ., 31 Januari 2018.

Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 perihal putusan tingkat pertama perkara Kopka EP., 29 November 2021.